

## **KINERJA BELANJA HIBAH UNTUK USAHA EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PEKANBARU**

**Rusdi Hamid Pane, Zulkarnaini, dan Hendro Ekwarso**

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

### **ABSTRAKSI**

*Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu wujud Belanja daerah. Belanja Hibah berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang memiliki usaha dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru untuk mengetahui kinerja belanja hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan terhadap kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti mengambil sampel sebanyak 3 kelompok masyarakat dan perorangan dengan jumlah 60 responden di Kota Pekanbaru. Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan kualitatif.*

*Dari hasil penelitan diketahui bahwa Kinerja Belanja Hibah dari pemerintah kota Pekanbaru untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan kepada kelompok masyarakat dan perorangan adalah program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Program ini telah mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.*

*Kehadiran hibah bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dan perorangan telah memberi nuansa tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penggunaan teknologi baru dalam mengelola usaha dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah dan kendaraan*

*Dampak kinerja alokasi hibah bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dan perorangan bagi kelembagaan kelurahan muncul karena setiap musyawarah melibatkan peran serta masyarakat, baik aparatur kelurahan, maupun kelembagaan yang ada di kelurahan. Sinergi antar lembaga semakin baik melalui implementasi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.*

*Kata kunci : Belanja Hibah, Usaha Ekonomi, Penentasan Kemiskinan, Kesejahteraan.*

## 1. PENDAHULUAN

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 1 : Alokasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dan Perorangan

No	Tahun	Jumlah ( Rp )		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	( Rp )	%
1	2008	9.400.000.000	13.550.000.000	4.150.000.000	44,15
2	2009	21.276.000.000	21.276.000.000	0	0

Sumber : Buku Anggaran DPRD Kota Pekanbaru.

Bagaimana manfaat dari belanja hibah dari tabel diatas kepada kelompok masyarakat dan perorangan untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum diketahui secara pasti. Misalnya dari salah satu sudut pandang bahwa belanja hibah tidak perlu untuk dianggarkan dalam APBD. Sementara dari persepsi lain menganggap bahwa belanja hibah yang dilakukan secara selektif dan tidak mengikat memang perlu, apabila memang mempunyai manfaat dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dan belanja hibah diberikan setelah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib, guna terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Permendagri 59/2007 menambahkan satu klausul yaitu pasal 42 ayat (4a) yang mengatur tentang belanja hibah. Klausul itu berbunyi, "Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pada dasarnya kedua persepsi diatas bertujuan untuk menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran.

Implementasi progam-program bantuan dana hibah berdasarkan laporan dari lembaga terkait dalam hal penyaluran dana menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Artinya dana-dana itu dapat diserap oleh masyarakat mencapai 100 %. Namun bagaimana dana itu dikelola oleh masyarakat dan sejauhmana manfaat dalam pencapaian tujuan masyarakat, masih belum dapat diketahui secara akurat dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kinerja belanja hibah untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Manajemen Keuangan

Didalam melakukan pengelolaan dan pengaturan dana atau kegiatan keuangan sangat dibutuhkan manajemen keuangan. Menurut **Keown (1996 : 2)** manajemen keuangan adalah upaya bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis dan kesejahteraan melalui pengambilan keputusan mulai dari pengumpulan dana, pembiayaan dan pengalokasian modal suatu perusahaan. Sedangkan **Wachowiez and Horne (1995 : 2)** mengatakan *financial management is concerned with the acquisition, financing and management of asset with some overall goal in mind. Thus the decision function of financial management can be broken down into these major areas, the investmen financing and asset managemet decisions.* (Manajemen keuangan mempunyai kaitan dengan dana yang diperoleh, pembiayaan dan manajemen asset dengan melakukan pengambilan keputusan. Dimana fungsi keputusan manajemen keuangan dapat memecahkan masalah keuangan dan pengalokasian modal untuk membiayai dan asset managemet keputusan).

Ruang lingkup dari pembahasan keuangan tidak terlepas dari hal yang penting, yaitu Jasa keuangan (*financial service*), hal ini berhubungan dengan pemberian nasehat dan perencanaan produk-produk keuangan individu, bisnis dan pemerintah. Manajemen keuangan (*financial management*), hal ini berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan keuangan atau non keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non profit. (Lukas Setia, 2003 : 2)

### **Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan otonomi daerah mengisyaratkan dilaksanakan desentralisasi pada pemerintahan daerah. Desentralisasi tidak dipisahkan dengan masalah sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Karena pada dasarnya berkenaan dengan “*delegation of a uthority and responsibility*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan. *Good government* merupakan perwujudan dari otonomi daerah., dimana menurut Sedarmayanti (2003 : 4) mengatakan bahwa *good government* mempunyai tiga kaki yaitu *Economic government* meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity, proverty and equity of life*. *Political government* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative government* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

### **Konsep Efektivitas Pengeluaran Belanja APBD ( Hibah )**

Pengeluaran APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Efektivitas pengeluaran APBD akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Efektivitas pengeluaran APBD sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal pemerintahan daerah, antara lain proses penyusunan APBD, peran partisipasi masyarakat, dukungan politis dari pihak DPRD, kesinambungan dengan APBD sebelum dan sesudah tahun anggaran yang bersangkutan, dan sinergi dengan program-program Pemerintah.

Proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang sangat beragam. Proses penyusunan anggaran yang baik tentunya akan merespon kepentingan masyarakat dan mewujudkannya dalam anggaran yang efisien, sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan perencanaannya. Tantangan dalam proses penyusunan APBD yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang jelas antara *input* (anggaran dalam APBD) dengan *output* dan *outcome* dari program dan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan politik dari DPRD juga sangat menentukan efektivitas pengeluaran APBD karena kedua unsur tersebut akan menentukan *outcome* yang akan dicapai dan sekaligus menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mencapainya. Tantangan lainnya adalah kesinambungan karena pada dasarnya sebagian besar program dan kegiatan tidak akan bisa dilihat dampaknya secara nyata dalam waktu yang singkat, dan juga harus selalu ditunjang dengan program/kegiatan lain yang saling terkait dalam rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, usaha untuk menjaga kesinambungan dari program dan kegiatan melalui pola belanja APBD akan menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian efektivitas pengeluaran APBD.

Selain permasalahan dan tantangan yang ada di daerah, terdapat beberapa hal yang juga menjadi kendala di luar proses yang berlangsung di daerah. Tantangan tersebut adalah sinergi antara program nasional dan kebijakan di daerah. Pengeluaran APBD akan menjadi tidak efektif apabila tidak sejalan dengan program pembangunan nasional, atau sebaliknya. Untuk menilai apakah rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan oleh provinsi sudah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah, Pemerintah melakukan evaluasi atas Rancangan APBD provinsi tersebut. Dalam hal ini, diperlukan kesiapan Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan melakukan koreksi jika kebijakan Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi belum diakomodasi dalam program dan kegiatan beserta anggarannya yang diusulkan dalam RAPBD yang bersangkutan.

Kinerja belanja daerah ditentukan oleh tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator efektivitas dan efisiensi penggunaan dana antara lain mencakup biaya unit kegiatan ( *input* ), kesesuaian jenis penggunaan ( *output* ), hasil kegiatan ( *outcome* ), manfaat ( *benefit* ) dan dampak ( *impact* )

Menurut **W. Riawan Tjandra ( 47 : 2006 )** Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat dikategorisasikan :

1. Input adalah jumlah sumber daya yang digunakan, biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah dana atau jumlah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan *outputs* dan *outcomes*.
2. Output adalah jumlah barang atau jasa yang berhasil diserahkan kepada konsumen ( diselesaikan ) selama periode pelaporan. *Output* merujuk pada jumlah produk yang dihasilkan oleh aktifitas internal. Meskipun output memicu terjadinya *outcome*, *output* itu sendiri tidak secara otomatis menyatakan hasil yang dicapai.
3. Outcome adalah kejadian atau perubahan kondisi, perilaku, atau sikap yang mengindikasikan kemajuan kearah pencapaian misi dan tujuan program. Indikator *outcome* merupakan ukuran jumlah dan atau kekerapan terjadinya kejadian atau perubahan tersebut.
4. Benefit adalah manfaat yang diperoleh dari hasil. Benefit merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penganggaran belanja daerah.
5. Impact adalah pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan. Sifatnya makro dan regional.

### **Masyarakat Penerima Hibah**

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah *society* , sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab *Syakara* yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Ada beberapa pengertian masyarakat :

- a. Menurut Selo Sumarjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan

- b. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
- c. Menurut Ralph Linton masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Ada beberapa kriteria kelompok masyarakat dan perorangan yang mendapatkan belanja hibah dari pemerintah kota Pekanbaru :

1. Kelompok masyarakat dan perorangan yang dapat meningkatkan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kelompok masyarakat dan perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
3. Kelompok masyarakat dan perorangan yang melaksanakan kegiatan tertentu.
4. Kelompok masyarakat dan perorangan yang dapat menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah
5. Kelompok masyarakat dan perorangan yang berbadan hukum dan memiliki kondisi manajemen yang baik.

Hibah yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pemberian hibah untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan :

1. Permohonan atau proposal ditujukan kepada Walikota melalui SKPD terkait, dengan melampirkan kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh yang berhak atau pemohon.
2. Setelah ada disposisi persetujuan Walikota oleh SKPD terkait disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
3. Proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru:

- a. Setelah ada disposisi Kepala BPKAD Kota Pekanbaru untuk diproses, bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan meneliti ketersediaan anggaran dimaksud dan selanjutnya dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP) dengan diketahui oleh pejabat penatausahaan keuangan.
  - b. Setelah ada disposisi Kepala BPKAD Kota Pekanbaru untuk diproses, Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan meneliti ketersediaan anggaran dimaksud dan selanjutnya dibuatkan surat perintah membayar (SPM) dengan diketahui oleh pejabat penatausahaan keuangan.
  - c. Selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa BUD.
4. Ketentuan Pembayaran diserahkan langsung kepada yang berhak atau melalui satuan kerja perangkat daerah terkait sebagai pemohon.

### **Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : Belanja hibah untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam bentuk bantuan dana dan barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif dan tidak mengikat diduga mempunyai manfaat dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru.



### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan Penerima Bantuan Modal UEK-SP**

Perlu adanya penanganan masalah kemiskinan di perkotaan seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di perkotaan yaitu melalui program bantuan Modal Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ( UEK-SP ). Dalam pelaksanaan UEK-SP yang berhak menerima dana bantuan modal dengan sistem pinjaman bergulir adalah kelompok masyarakat dan perorangan. Dari hasil penelitian penerima bantuan modal UEK-SP berdasarkan rata-rata tingkat umur . berkisar antara 40-49 tahun berjumlah 10 orang responden atau 50% artinya penerima bantuan modal UEK-SP masih tergolong usia produktif. Selain itu ada institusi lokal yang dibentuk sebagai suatu wadah masyarakat. Dengan adanya bantuan modal, diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam yang ada, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Pekanbaru bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, melainkan karena struktural yang multidimensi. Dari hasil penelitian terhadap tingkat pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata penerima bantuan modal UEK-SP adalah berpendidikan tamat SLTA yaitu sekitar 45%. Hal ini kemungkinan mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas ekonomi, sosial, dan politik.

**Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kegiatan: Bantuan Modal Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Simpan Pinjam Badan SPPM Kota Pekanbaru 2009**

No.	Ringkasan Narasi	Indikator Kinerja	Sumber Informasi/ Cara Pembuktian Pencapaian Indikator
<b>1</b>	<b>Masukan/Inputs</b>		
	o Tersedianya sumber dana UEK-SP	Dana: Rp. 1.500.000.000,- (2009)	o Badan PPM Provinsi Riau o Badan SPPM Kota Pekanbaru
<b>2</b>	<b>Keluaran/Outputs</b>		
	o Terlaksananya pemberdayaan masyarakat o Terbentuknya usaha ekonomi masyarakat Kelurahan o Kuatnya kelembagaan kelurahan	o Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan o Pelatihan Kader, Tim Verifikasi, dan pengguna dana	o Kasie PMD kecamatan o Lurah o Badan SPPM Kota Pekanbaru o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>3</b>	<b>Hasil/Outcomes</b>		
	o Tingginya pendapatan masyarakat dan cepatnya guliran dana	o Jumlah peminjam, pinjaman dan lama pengembalian	o Tim verifikasi o Lurah o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>4</b>	<b>Manfaat/Benefits</b>		
	o Peluang usaha dikuasai penduduk tempatan o Meningkatnya kualitas dan kuantitas aset yang dimiliki penduduk desa	o Jumlah usaha o Aset yang dimiliki penduduk	o Kasie PMD kecamatan o Kelurahan o Badan SPPM Kota Pekanbaru
<b>5</b>	<b>Sasaran/Dampak/Impacts</b>		
	o Iklim usaha yang kondusif di pedesaan o Tersedianya kebutuhan dasar penunjang ekonomi desa	o Pertumbuhan jumlah usaha ekonomi o Sarana dan prasarana ekonomi	o Kasie PMD kecamatan o Badan SPPM Kota Pekanbaru o Dunia usaha o Lembaga pembiayaan

Sumber : Badan SPPM Kota Pekanbaru

Selama tahun 2009 telah disalurkan dana PPK UED-SP kepada 3 Kelurahan di Kota Pekanbaru senilai Rp 1,500,000,000 setiap kelurahan diberi Rp. 500 juta. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Pekanbaru, dengan dukungan seluruh Dinas Instansi Sektor Kota Pekanbaru. Alokasi Dana Usaha Ekonomi Kelurahan sekitar 10% disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok) melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh tenaga pendamping kelurahan dan pengelola UEK-SP. Jaminan yang dijadikan agunan disesuaikan dengan kondisi setempat yang tidak memberatkan masyarakat. Kelayakan usaha masyarakat tetap menjadi pertimbangan dengan besarnya pinjaman maksimal Rp. 10 juta, jasa pinjaman minimal 10% per tahun dan jangka pinjaman maksimal 2 tahun.

Kehadiran PPK UEK-SP memberi nuansa tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penguasaan peluang-peluang ekonomi oleh masyarakat tempatan dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah dan kendaraan. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa adanya peningkatan pendapatan yaitu berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan lebih dari Rp 1.000.000. Dampak PPK UEK-SP bagi kelembagaan kelurahan muncul karena setiap musyawarah melibatkan peran serta masyarakat, baik aparat kelurahan, maupun kelembagaan yang ada di kelurahan. Sinerji antar lembaga semakin baik melalui implementasi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, meskipun masih perlu pembinaan lanjutan. Hal ini terutama di dalam mengatasi masalah tunggakan dari pinjaman modal, di mana elemen masyarakat perlu disertakan guna memberi solusi terhadap pemecahannya.

### **Pembahasan Penerima Bantuan Modal Usaha Palawija**

Pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai sebuah pendekatan operasional. Apabila dilihat dari tingkat umur penerima bantuan modal usaha palawija rata rata berumur antara 40-49 tahun atau sekitar 55%. Ini merupakan komitmen pemerintah kota Pekanbaru di dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat karena penerima bantuan modal usaha palawija masih tergolong usia produktif. Bantuan modal Usaha Palawija adalah upaya nyata dari pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

**Hibah Bantuan Modal Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan: Bantuan Modal Usaha Palawija KPIPT Kota Pekanbaru 2009**

No.	Ringkasan Narasi	Indikator Kinerja	Sumber Informasi/ Cara Pembuktian Pencapaian Indikator
<b>1</b>	<b>Masukan/Inputs</b>		
	o Tersedianya sumber dana bantuan modal usaha palawija	Dana: Rp. 500.000.000,- (2009)	o KPIPT Kota Pekanbaru
<b>2</b>	<b>Keluaran/Outputs</b>		
	o Terlaksananya pemberdayaan masyarakat o Kuatnya usaha ekonomi masyarakat	o Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan o Pelatihan Kader, Tim Verifikasi, dan pengguna dana	o Kelurahan o KPIPT Kota Pekanbaru o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>3</b>	<b>Hasil/Outcomes</b>		
	o Meningkatnya pendapatan masyarakat o Teknologi yang digunakan dalam mengelola usaha palawija	o Jumlah pendapatan masyarakat o Penggunaan Teknologi Baru	o Kelurahan o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>4</b>	<b>Manfaat/Benefits</b>		
	o Peluang usaha palawija dikuasai masyarakat o Meningkatnya aset yang dimiliki masyarakat	o Jumlah usaha palawija o Aset yang dimiliki masyarakat	o Kelurahan o KPIPT Kota Pekanbaru
<b>5</b>	<b>Sasaran/Dampak/Impacts</b>		
	o Iklim usaha palawija yang kondusif di Kelurahan o Tersedianya kebutuhan dasar penunjang ekonomi Kota	o Pertumbuhan jumlah usaha ekonomi o Sarana dan prasarana ekonomi	o KPIPT Kota Pekanbaru o Dunia usaha

Sumber KPIPT Kota Pekanbaru 2009

Hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha palawija adalah untuk mendorong berkembangnya perekonomian usaha palawija masyarakat di Kelurahan, terutama bagi mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Dari hasil penelitian penerima bantuan modal usaha palawija kebanyakan menamatkan tingkat pendidikan SLTA yaitu sekitar 45%. Diharapkan dengan meningkatnya pendidikan dapat mengembangkan usaha palawija masyarakat yang akan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan dan diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha palawija produktif masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2009 telah disalurkan dana bantuan modal usaha palawija kepada 100 rumah tangga di Kota Pekanbaru senilai Rp 500,000,000 setiap rumah tangga diberi Rp. 5 juta. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Pekanbaru, dengan dukungan seluruh Dinas Instansi Sektor Kota Pekanbaru.

Alokasi bantuan modal usaha palawija tidak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok), karena tenaga pendamping kelurahan tidak mempunyai pertimbangan khusus untuk menentukan penerima bantuan modal usaha palawija. Artinya bantuan modal usaha palawija diberikan kepada setiap usaha palawija yang mengajukan permohonan asalkan usaha palawijanya ada. Bantuan modal usaha palawija diberikan tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya, tapi harus memberikan laporan pengalokasian bantuan modal usaha palawija.

Kehadiran hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha palawija memberi nuansa tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penggunaan teknologi baru dalam mengelola usaha palawija dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah dan kendaraan. Hal ini dikerenakan adanya peningkatan pendapatan. Dari hasil penelitian bahwa penerima bantuan modal usaha palawija mengalami peningkatan pendapatan berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan lebih dari Rp 1 juta setiap bulannya

### **Pembahasan Penerima Bantuan Modal Usaha Pengolahan Limbah Kertas**

Apabila dilihat dari tingkat umur penerima bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas rata-rata berumur antara 40-49 tahun atau sekitar 55%. Ini merupakan komitmen pemerintah kota Pekanbaru di dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena penerima bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas masih tergolong usia produktif. Bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas adalah upaya nyata dari pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas adalah untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Kelurahan, terutama bagi mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Penerima bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas kebanyakan menamatkan tingkat pendidikan SLTA yaitu sekitar 55%. Diharapkan dengan meningkatnya pendidikan dapat mengembangkan usaha pengolahan limbah kertas masyarakat yang akan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan dan diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha pengolahan limbah kertas produktif masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2009 telah disalurkan dana bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas kepada 80 rumah tangga di Kota Pekanbaru senilai Rp 400,000,000 setiap rumah tangga diberi Rp. 5 juta. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Pekanbaru, dengan dukungan seluruh Dinas Instansi Sektoral Kota Pekanbaru. Alokasi bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas tidak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok), karena tenaga pendamping kelurahan tidak mempunyai pertimbangan khusus untuk menentukan penerima bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas

**Hibah Bantuan Modal Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan: Bantuan Modal Usaha Pengolahan Limbah Kertas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Kota Pekanbaru 2009**

No.	Ringkasan Narasi	Indikator Kinerja	Sumber Informasi/ Cara Pembuktian Pencapaian Indikator
<b>1</b>	<b>Masukan/Inputs</b>		
	o Tersedianya sumber dana bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas	Dana: Rp. 400.000.000,- (2009)	o Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru
<b>2</b>	<b>Keluaran/Outputs</b>		
	o Terlaksananya pemberdayaan usaha pengolahan limbah kertas masyarakat o Kuatnya usaha pengolahan limbah kertas	o Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan o Pelatihan Kader, Tim Verifikasi, dan pengguna dana	o Kelurahan o Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>3</b>	<b>Hasil/Outcomes</b>		
	o Meningkatnya pendapatan masyarakat o Teknologi yang digunakan	o Jumlah pendapatan masyarakat o Penggunaan Teknologi Baru	o Kelurahan o Tenaga pendamping Kelurahan
<b>4</b>	<b>Manfaat/Benefits</b>		
	o Peluang usaha Pengolahan Limbah Kertas dikuasai masyarakat o Meningkatnya aset yang dimiliki masyarakat	o Jumlah usaha Pengolahan Limbah Kertas o Aset yang dimiliki masyarakat	o Kelurahan o Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru
<b>5</b>	<b>Sasaran/Dampak/Impacts</b>		
	o Iklim usaha Pengolahan Limbah Kertas yang kondusif di Kelurahan o Tersedianya kebutuhan dasar penunjang ekonomi Kota	o Pertumbuhan jumlah usaha ekonomi o Sarana dan prasarana ekonomi	o Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru o Dunia usaha

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Kota Pekanbaru 2009

Bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas diberikan kepada setiap usaha pengolahan limbah kertas yang mengajukan permohonan asalkan usaha pengolahan limbah kertasnya ada. Bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas diberikan tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya, tapi harus memberikan laporan pengalokasian bantuan modal usaha pengolahan limbah kertas. Dampak ke depan dari pelaksanaan hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan di Kelurahan. Dampak bagi pemberdayaan masyarakat berupa teridentifikasinya akar penyebab masalah usaha pengolahan limbah kertas adalah modal.

Kehadiran hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha Pengolahan Limbah Kertas memberi nuansa tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penggunaan teknologi baru dalam mengelola usaha pengolahan limbah kertas dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah dan kendaraan. Sinerji antar lembaga semakin baik melalui implementasi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, meskipun masih perlu pembinaan lanjutan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian hasil dan pembahasan 3 kelompok masyarakat dan perorangan yang mendapatkan alokasi belanja hibah dari pemerintah kota Pekanbaru seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja alokasi Belanja Hibah dari pemerintah kota Pekanbaru untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Program ini telah mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



2. Kehadiran hibah bantuan modal untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan telah memberi nuansa tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penggunaan teknologi baru dalam mengelola usaha dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah dan kendaraan.
3. Tenaga pendamping kelurahan sangat berpengaruh dalam alokasi dana usaha ekonomi kelurahan karena tenaga pendamping kelurahan menentukan kelayakan, kondisi dan kebutuhan usaha masyarakat sementara alokasi bantuan hibah program pengentasan kemiskinan justru sebaliknya, yaitu tenaga pendamping kelurahan tidak berpengaruh karena tidak menentukan kondisi, kebutuhan dan kelayakan usaha masyarakat.
4. Dampak ke depan dari kinerja alokasi belanja hibah untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru kepada kelompok masyarakat dan perorangan adalah pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan di desa. Dampak bagi pemberdayaan masyarakat berupa teridentifikasinya akar penyebab kemiskinan, tersusunnya peta sosial masyarakat, rasa tanggung jawab atas keputusan bersama, banyaknya masyarakat yang terampil mengelola keuangan dan adanya kalender musim bagi usaha ekonomi desa.
5. Dampak kinerja alokasi hibah bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dan perorangan untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi kelembagaan kelurahan muncul karena setiap musyawarah melibatkan peran serta masyarakat, baik aparat kelurahan, maupun kelembagaan yang ada di kelurahan. Sinerji antar lembaga semakin baik melalui implementasi tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, meskipun masih perlu pembinaan lanjutan. Hal ini terutama di dalam mengatasi masalah, di mana elemen masyarakat perlu disertakan guna memberi solusi terhadap pemecahannya.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keberlangsungan alokasi belanja hibah untuk usaha ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha di kota Pekanbaru, disarankan agar partisipasi masyarakat tidak hanya diarahkan pada bentuk partisipasi yang hanya turut serta dalam rangka implementasi program, tetapi harus ditingkatkan menjadi partisipasi dalam merencanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Untuk itu perlu direncanakan suatu program yang melibatkan masyarakat pengguna program dalam setiap tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu melibatkan atau meminta masukan dari unsur elit lokal seperti tokoh masyarakat, perangkat Kelurahan, dan para ketua/pengurus RT/RW dalam setiap penyusunan program kerja, sehingga para elit lokal tersebut dapat turut serta mensukseskan, dan mengawasi jalannya pelaksanaan program kerja tersebut, serta bahkan dapat ikut bertanggung jawab apabila dikemudian hari program tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah hendaknya berpartisipasi dalam kegiatan program bantuan modal usaha sehingga program pemberdayaan terlaksana dengan baik.
3. Dalam pemberian hibah bantuan modal program pengentasan kemiskinan perlu menyesuaikan dengan, kelayakan, kondisi dan kebutuhan usaha masyarakat.
4. Perlu meningkatkan kapasitas masyarakat yang dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, pembangunan prasarana pendukung, penyediaan sarana penunjang, dan penguatan kelembagaan sebagai wadah usaha masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aryad., 1999., *Ekonomi Pembangunan.*, Penerbit STIE YKPN., Yogyakarta.
- Atep dan Bambang., 2004., *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.*, Penerbit Alex Media Komputindo., Jakarta.
- Devas N. Binder., 1997., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.*, Edisi Terjemahan., UI Press., Jakarta.
- Handoko., 1998., *Manajemen.*, Jilid II., Penerbit BPFE., Jakarta.
- Husnan Suad dan Pudjiastuti Enny., 2002., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan.*, Penerbit UPP AMP YKPN., Yogyakarta.
- Ibnu, S., Mukhadis, A dan Dasna, I.W., 2003. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Malang:
- Kaho Riwu., 1998., *Kendala-kendala dan Prospek Penyelenggaraan titik berat Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota.*, Jurnal MIPI., Jakarta.
- Kencana Inu Syafei., 2003., *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.*, Penerbit Bina Aksara., Jakarta.
- Keown Arthur J., 1996., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan.*, Penerbit Salemba Empat., Jakarta.
- Kirana Wihana Jaya., 1999., *Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro.*, Penerbit PPPEB UGM., Yogyakarta.
- Lukas Setia Atmaja., 2003., *Manajemen Keuangan.*, Penerbit Andi Offset., Yogyakarta.
- Mardiasmo., 2000., *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah.*, UGM., Yogyakarta.
- Munandar., 1999., *Budgeting.*, Edisi I., BPFE., Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pedoman Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Sedarmayanti., 2003., *Good Government.*, Penerbit Mandar Maju., Bandung.
- Siagian S.P., 2000., *Filsafat Administrasi.*, Penerbit Gunung Agung., Jakarta.
- Stoner James., 1996., *Manajemen.*, Prentice Hall., New Jersey.
- Suparmoko., 2000., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.*, Edisi 5., BPFE., Yogyakarta.
- Tadoro., 2000., *Economic Development.*, Sixth Edition., Longman Publisher., London
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Winardi., 2003., *Teori Organisasi dan Pengorganisasian.*, Penerbit Raja Grafindo Persada., Jakarta.

Yani Ahmad., 2002., *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*, Penerbit Raja Grafindo., Jakarta.